

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANSUNG TUNAI
DI DESA PULAU BAYUR KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Di susun dan di ajukan untuk penyusunan skripsi
Pada Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



OLEH:

**MUSDALIPA
NIM : 220411053**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TALUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

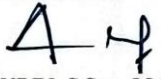
Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 03
Bulan : September
Tahun : 2026

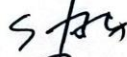
Tim Penguji

KETUA


Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

SEKRETARIS


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. RISVANDI, S.Pd.L., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESIYAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 100812002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

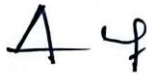
JUDUL : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANSUNG
TUNAI DI DESA PULAU BAYUR KECAMATAN
CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
NAMA : MUSDALIPA
NPM : 220411053
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I


EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : MUSDALIPA
NPM : 220411053
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, April 2026



MUSDALIPA
NPM. 220411053

MOTTO

"Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan itu Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan".

(Q.S. Al-Insyirah, 94:5-6)

"life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and into new chapters of your life is about catch and release, what I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release, you can't carry all things, decide what is your to hold and let the rest go."

(taylor swift)

"kepada diriku di masa depan tidak papa jika kau tidak seperti apa yang kau inginkan, Karena aku akan selalu menjadi yang paling menyayangi dan mendukungmu."

(hello me)

"kita punya kendali penuh atas pilihan hidup kita. Yang penting terus bergerak, meski pelan."

(maudy ayunda)

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Aswandi** dan **Ibunda Yulinarmi**, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis sehingga dapat mengecap pendidikan serta dapat menyaksikan keindahan dunia ini. Terima kasih juga telah membesarkan dan mendidik penulis dan juga sudah menjadi penyemangat terhebat dalam kehidupan penulis.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



MUSDALIPA
NPM. 220411053

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil'amin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANSUNG TUNAI DI DESA PULAU BAYUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan karya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program Bantuan Lansung Tunai (BLT) di Desa Pulau Bayur, khususnya terkait efektivitas, ketepatan sasaran, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si selaku ketua program studi administrasi Negara fakultas ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Meliofatria, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing akademik Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing 1
6. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing 2.
7. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Aswandi dan Ibu Yulinarmi. Terimakasih telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik,

membimbing serta mendoakan penulis, sehingga penulis biasa mencapai titik yang luar biasa ini.

9. Kepada acik Al-Mizra S.E, abang dan kakak kandung tersayang (Muhardi, S.Pdi, Juminarti, Sp, Mairizaldi, Halimatun Sakdiah, Mai Sarah, dan Ramadani) serta para keponakan (Nayra Alzahra Zariadi) yang telah memberi semangat dan banyak sekali membantu dan membimbing penulis selama berkuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
10. Kepada teman-teman yang saling menguatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta mensupport masa perkuliahan.

Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, Oktober 2026

Penulis,

MUSDALIPA
NIM. 220411053

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRAK.....</i>	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara	11
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan.....	13
2.1.3 Teori/Konsep Implementasi	18
2.1.4 Teori/Konsep Pemerintah Desa.....	19
2.1.5 Teori/Konsep Efektivitas.....	21
2.1.6 Teori/Konsep Bantuan Lansung Tunai.....	23
2.2 Kerangka Pemikiran	24
2.3 Hipotesis.....	26
2.4 Definisi Operasional.....	26
2.5 Operasional Variabel	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Informan	29
3.3 Sumber Data.....	29
3.3.1 Data Primer	30
3.3.2 Data Sekunder.....	30
3.4 Fokus Penelitian	30

3.5 Lokasi Penelitian	30
3.6 Metode Pengumpulan Data	31
3.6.1 Observasi	31
3.6.2 Wawancara	31
3.6.3 Dokumentasi	31
3.6.4 Triangulasi	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.7.1 Reduksi Data	32
3.7.2 Penyajian Data	32
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	33
3.8 Jadwal Penelitian	34
BAB IV TINJAUAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Sejarah Desa Pulau Bayur	41
4.2 Keadaan Geografis Desa Pulau Bayur	35
4.3 Keadaan Penduduk	40
4.4 Sarana Prasarana	41
4.5 Kondisi Perekonomian Masyarakat	41
4.6 Struktur Organisasi	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Identitas informan	46
5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin	46
5.1.2 Informan Berdasarkan Tingkat Umur	47
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
5.1.4 Informan Berdasarkan Jabatan	48
5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	49
BAB VI PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 : Data Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Pulau Bayur Tahun 2026.....	6
Tabel II.1 : Operasional Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	25
Tabel III.1 : Informan Penelitian tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	26
Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas rogram Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026	31
Tabel IV.4 : Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tabel IV.5 : Data Jumlah KK dan Rumah Tangga.....	
Tabel IV.4 : Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Tabel V.1 : Jumlah Informan Dalam penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	
Tabel V.2 : Jumlah Informan Dalam penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Umur	
Tabel V.3 : Jumlah Informan Dalam penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Tabel V.4 : Jumlah Informan Dalam penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Jabatan	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 : Kerangka Berfikir tentang Efektivitas Program Bantuan Lansung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	21
GambarIV.2 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	: Daftar Wawancara Kualitatif
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	: Surat Keputusan Dekan Fa kultas Ilmu Sosial
Lampiran 4	: Surat Balasan Riset Penelitian
Lampiran 5	: Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian
Lampiran 6	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian
Lampiran 7	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi Penelitian
Lampiran 8	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANSUNG TUNAI DI DESA PULAU BAYUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

**MUSDALIPA
NPM. 220411053**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pada kondisi krisis sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur, meliputi proses penyaluran, ketepatan sasaran, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT di Desa Pulau Bayur pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan data penerima manfaat dan potensi ketidaktepatan sasaran. Program BLT memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akurasi data dan pengawasan yang lebih optimal agar pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Program Bantuan Langsung Tunai, Pemerintah Desa.

ABSTRACT

***Effectiveness of the Direct Cash Assistance Program in Pulau Bayur Village,
Cerenti Subdistrict, Kuantan Singingi Regency.***

By:

MUSDALIPA

NPM. 220411053

The Direct Cash Assistance (Bantuan Langsung Tunai/BLT) program is one of the government policies aimed at assisting poor and vulnerable communities in meeting their basic needs, particularly during periods of social and economic crisis. This study aims to analyze the implementation of the Direct Cash Assistance program in Pulau Bayur Village, including the distribution process, targeting accuracy, and the program's impact on community welfare. The research employed a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The results indicate that the implementation of the BLT program in Pulau Bayur Village has generally been carried out in accordance with applicable regulations, although several obstacles remain, including limitations in beneficiary data and potential targeting inaccuracies. The BLT program has had a positive impact on beneficiary communities, particularly in helping to meet daily basic needs. Therefore, improving data accuracy and strengthening supervision are necessary to ensure that the implementation of the Direct Cash Assistance program becomes more effective and well-targeted.

Keywords: Direct Cash Assistance Program, Village Government.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia maupun di negara-negara lain mengalami permasalahan kemiskinan hampir sama. Perbedaannya hanya kualitas diberbagai negara begitu pula dengan faktor penyebab kemiskinan begitu beragam diberbagai negara dan masalah kemiskinan seperti ketersediaan kebutuhan pokok merupakan faktor paling umum menjadi tantangan bagi pemerintah. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi dimana bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan pendapatan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum dan sebagainya. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan kesejahteraan dan perampasan terhadap kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seorang manusia.

Kemiskinan merupakan masalah utama paling mendasar setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Terutama bagi Indonesia yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat didunia, dan memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi pula. Tentunya pemerintah Indonesia harus berusaha lebih mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat demi terwujudnya tatanan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan populasi yang cukup besar tersebut, pemerintah tentu memiliki tantangan besar serta usaha,

kegigihan dan kuat pula dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Masalah kemiskinan ini tentunya bukan negara Indonesia saja yang mengalaminya, ada banyak negara berkembang yang mengalami masalah kemiskinan bahkan lebih parah dari Indonesia. Masalah kemiskinan ini juga terdapat dinegara maju namun dengan kuantitas yang lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang. Tentunya semua orang, warga dan masyarakat menginginkan hidup berkecukupan dan sejahtera. Namun tidak semua orang mendapatkan hidup layak dan berkecukupan dalam hidupnya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya disingkat BLT). Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi langsung kepada masyarakat miskin atau rentan miskin, terutama ketika terjadi tekanan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau situasi darurat lainnya.

Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi informasi, serta keterbatasan anggaran desa. Hal ini penting dikaji mengingat efektivitas BLT sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang terdampak. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah BLT. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban ekonomi, khususnya pada situasi krisis atau tekanan ekonomi tertentu. BLT diharapkan mampu menjadi

instrumen perlindungan sosial yang efektif melalui penyaluran bantuan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan tepat.

Di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, pelaksanaan program BLT telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu program penting bagi masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti akurasi data penerima, ketepatan sasaran, mekanisme pendataan, transparansi informasi, hingga pemanfaatan bantuan oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana program BLT benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta bagaimana efektivitas penyelenggaraan program tersebut di tingkat desa.

Selain itu, dinamika sosial masyarakat yang beragam juga mempengaruhi persepsi dan penerimaan terhadap program BLT. Beberapa warga merasa program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi ada pula yang menilai bahwa penentuan penerima belum sepenuhnya adil. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih komprehensif untuk menilai apakah program BLT telah berjalan sesuai prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai pelaksanaan BLT di Desa Pulau Bayur. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, mengevaluasi mekanisme penyaluran, serta memahami dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa maupun pihak

terkait dalam meningkatkan efektivitas program BLT ke depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi disetiap negara berbeda-beda, terutama dari bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dan tak terhitung jumlahnya, sedangkan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia tergolong tinggi namun masih berkualitas rendah. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terbilang rendah dan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum terselesaikan di beberapa negara. Terutama di negara berkembang khususnya di Indonesia. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal, dari standar hidup yang telah ditentukan. menghambat tumbuh kembangnya suatu negara.

BLT merupakan salah satu instrumen kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Mulyadi (2016 : 189-191) bantuan tunai langsung adalah bentuk intervensi pemerintah yang diberikan secara langsung kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat pada situasi tertentu. Pendapat ini menegaskan bahwa BLT tidak hanya bersifat bantuan finansial, tetapi juga menjadi instrumen stabilisasi sosial.

Para ahli kebijakan publik, seperti Dye (2013 : 15-18) menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, mekanisme pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap kelompok yang dituju. Dalam konteks BLT, keberhasilan program bergantung pada kualitas pendataan, stransparansi, dan akuntabilitas dalam proses penetapan penerima manfaat. Sementara itu, Nugroho (2014 : 201-204) menekankan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada penyelesaian masalah sosial secara nyata, sehingga evaluasi program seperti BLT penting dilakukan untuk melihat sejauh mana program tersebut benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara regulasi, pelaksanaan BLT memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan program bantuan sosial untuk menjamin kehidupan dasar masyarakat miskin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa, termasuk penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat melalui skema BLT Dana Desa. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahan-perubahannya, yang mengatur mekanisme pendataan, penetapan, hingga penyaluran BLT Dana Desa secara nasional guna memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat desa yang membutuhkan.

Berdasarkan data Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Pulau Bayur Tahun 2026.

Tabel I.1 : Data Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Pulau Bayur Tahun 2026

No	Nama Kepala Keluarga	NO. KK	NIK	Jumlah (Rp)	Tanggal Penerimaan	Tanda Tangan	
1	NASRON	1409050306100003	1409050107550020	Rp. 900.000	12 Juni 2026	1	2
2	YULITA	14090500801088372	1409054207760001	Rp. 900.000	12 Juni 2026		
3	NADRI	14090500107580009	1409054107570009	Rp. 900.000	12 Juni 2026	3	4

Sumber : Kantor Kepala Desa Tahun 2026

Dalam pelaksanaan program BLT di Desa Pulau Bayur, pemerintah desa telah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan. Penerima BLT umumnya merupakan masyarakat yang tergolong miskin atau rentan secara ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, jumlah penerima bantuan BLT di Desa Pulau Bayur tercatat sebanyak 3 orang atau kepala keluarga. Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat masyarakat yang tergolong miskin tetapi tidak tercatat sebagai penerima bantuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait akurasi data dan proses penentuan penerima BLT di tingkat desa.

Selain itu, dalam proses penyaluran bantuan, penerima BLT biasanya dipanggil atau dijemput ke kantor desa untuk menerima bantuan sekaligus melakukan dokumentasi sebagai bukti administrasi penyaluran bantuan. Hal ini dilakukan agar proses penyaluran dapat tercatat dengan baik dan memiliki bukti pertanggung jawaban yang jelas.

Dari sisi mekanisme waktu penyaluran, bantuan BLT di Desa Pulau Bayur disalurkan secara berkala, yaitu sekitar tiga bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa berdasarkan ketentuan penggunaan Dana Desa. Meskipun demikian, waktu penyaluran yang tidak selalu tepat waktu terkadang menjadi perhatian masyarakat karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun kriteria masyarakat yang diprioritaskan sebagai penerima BLT antara lain masyarakat yang tergolong miskin ekstrem, masyarakat yang mengalami sakit menahun, serta masyarakat lanjut usia (lansia) yang berdomisili tetap di desa tersebut. Kriteria ini digunakan oleh pemerintah desa sebagai dasar dalam menentukan keluarga penerima manfaat agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Desa sebagai entitas pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang pengaturannya diperkuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan

sosial kepada keluarga miskin atau rentan yang terdampak kondisi ekonomi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan risiko kemiskinan ekstrem dapat ditekan.

Berdasarkan data laporan pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, periode Oktober sampai dengan Desember, tercatat sebanyak 3 Kepala Keluarga (KK) sebagai penerima bantuan. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp900.000, sehingga total anggaran yang disalurkan mencapai Rp2.700.000. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026 dan didokumentasikan melalui daftar penerimaan yang memuat identitas penerima, Nomor KK, NIK, jumlah bantuan, serta tanda tangan sebagai bukti penerimaan.

Secara administratif, data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran telah dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat dengan bukti pertanggungjawaban tertulis. Namun demikian, dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, aspek akurasi data penerima, ketepatan sasaran, transparansi proses penetapan penerima, serta kesesuaian waktu penyaluran tetap menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih lagi, periode bantuan yang tercantum adalah Oktober–Desember, sementara realisasi penyaluran dilakukan pada bulan Maret tahun berikutnya, sehingga terdapat aspek waktu yang relevan untuk dianalisis dari sisi administrasi dan efektivitas kebijakan.

Dalam implementasinya di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, BLT menjadi salah satu program penting bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi. Namun, berdasarkan pengamatan

awal dan dinamika sosial yang berkembang, masih ditemukan sejumlah persoalan seperti akurasi pendataan penerima, ketepatan sasaran, mekanisme verifikasi, serta pemanfaatan bantuan oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Beberapa warga menilai program ini sangat membantu, tetapi ada pula yang mempertanyakan keadilan dalam proses penentuan penerima.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Efektivitas Program Bantuan Lansung Tunai (BLT) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Lansung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”.**?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: **Pelaksanaan Program Bantuan Lansung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kuantan Singingi.**

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Menambah referensi mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat desa.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan BLT.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Faried Ali, 2017 : 4) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Faried Ali (2015 : 12) administrasi negara adalah kerja sama manusia yang tidak saja didasarkan pada pertimbangan rasio, tetap juga atas dasar realitas empirik tentang esensi eksistensi manusia dalam pencapaian tujuan bersama.

Willoughby dan Merriam (dalam Faried Ali, 2015 : 96) berpendapat bahwa administrasi negara pada waktu itu berkembang sebagai ilmu yang mandiri yang menekankan pada prinsip-prinsipnya secara universal.

Trisna (dalam Daryanto, 2011 : 7) administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien.

Ngalim Purwanto (2010 : 1) administrasi adalah suatu kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai suatu tujuan.

Ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha (2008 : 36 - 38) adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari. Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara maupun orang asing
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semua didorong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya berifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pemimpin tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena itu kegiatan administrasi negara sebagaimana bersifat politis dan tujuan

diantaranya untuk mencapai perdamaian, keadilan, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standard penelitian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dipihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi yang ditetapkan sebagai *basic proses of administration*, yang terdiri dari:

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan.
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan.
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan.
4. Menggerakkan dan memberikan intruksi agar kegiatan berlansung.
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relative sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Friedrich (dalam Hamdi, 2015 : 36) kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi

atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Sedangkan menurut Anderson (2010 : 113) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat empat hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. *Pertama*, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. *Kedua*, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. *Ketiga*, kebijakan harus mencangkup apa yang nyata pemerintah perbuat, apa yang mereka katakan akan dikerjakan. *Keempat*, untuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Dunn (dalam Indiahono, 2017 : 70) terdapat tiga belas masalah kebijakan, yaitu: *pertama*, masalah yang sederhana. Yang dimaksud masalah yang sederhana adalah masalah yang melibatkan suatu atau beberapa pembuatan keputusan dan seperangkat kecil alternative-alternatif kebijakan. *Kedua*, masalah yang agak sederhana. Masalah yang agak sederhana adalah masalah-masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternative yang

secara relative terbatas. *Ketiga*, masalah yang rumit. Yang dimaksud masalah yang rumit yaitu masalah-masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang utilitas (nilai)nya tidak diketahui atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten. Masalah bukan merupakan kesatuan mekanis; melainkan sistem yang bertujuan, dimana:

1. Tidak ada dua anggotanya yang sama persis di dalam semua atau bahkan setiap sifat-sifat atau perilaku mereka
2. Sifat-sifat dan perilaku setiap anggota mempunyai pengaruh pada sifat-sifat dan perilaku sistem secara keseluruhan
3. Sifat-sifat dan perilaku setiap anggota, dan cara setiap mempebgaruhi sistem secara keseluruhan, tergantung pada sifat-sifat dan perilaku paling tidak dari salah satu anggota sistem
4. Dimungkinkan sub kelompok anggota mempunyai suatu pengaruh yang tidak bebas atau tidak independen pada sistem secara keseluruhan.

Menurut Dye (dalam Dwiyanto, 2017 : 17) kebijakan dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah. Dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian kebijakan menurut Dye (dalam Dwiyanto, 2017 : 17) adalah merupak upaya untuk memahami :

- a. Apa yang di lakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
- b. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan

- c. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Hogwood dan Gunn (dalam Dwiyanto, 2017 : 17) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu:

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otoritas formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai *output*
8. Sebagai hasil (*outcome*)
9. Sebagai teori dan model
10. Sebagai sebuah proses

Menurut Harold Laswell (dalam Hamdi, 2015 : 36) kata '*policy*' umumnya digunakan untuk menunjukkan pilihan penting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi; '*policy*' adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang bedekatan dengan kata politik, yang sering kali diartikan 'memihak atau 'korupsi'.

Menurut Rose (dalam Hamdi, 2015 : 36) mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.

Selanjutnya menurut Hamdi (2015 : 79) mengatakan kebijakan publik sebagai suatu *output* penyelenggaraan pemerintahan negara mengundang perhatian sebanyak pihak untuk mengkaji dan mempelajarinya, baik dari kalangan birokrasi maupun dari kalangan akademis, proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik dapat di bedakan kedalam lima tahap berikut:

1. Penentu agenda, istilah agenda dalam kebijakan publik, antara lain diartikan sebagai daftar perihal atau masalah untuk mana pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintah yang terkait erat dengan para pejabat tersebut, meberikan perhatian serius pada saat tertentu. Jadi penentuan agenda merupakan proses untuk menjadikan suatu masalah agar mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yaitu menunjuk pada proses pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternative alaternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintah. Jadi formulasi kebijakan adalah sebagai desain dan penyusun rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.
3. Penetapan kebijakan, penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Jadi penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan tertentu.

4. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan bersangkut-paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.
5. Evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada perlu diteruskan atau dihentikan.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004 : 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahap, 2006 : 65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompo-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Leo Agustino (2008 : 139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2007 : 158), terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
4. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksanaan.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
6. Kecenderungan para pelaksana.

2.1.4 Teori/Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Ndraha (2008 : 8) menyatakan pemerintah desa adalah pengembangan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa.

Menurut Kartohadikusumo (2008 : 16) pemerintah dapat di artikan sebagai badan atau lembaga yang memepunyai kekuasaan mengatur dan memerintah suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Tentang Pemerintah Desa merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa secara nasional padamasa orde baru. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan bentuk, susunan, dan system pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam undang-undang ini, desa didefinisikan sebagai wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.

Menurut Suparmoko (2008 : 61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus menerapkan faktor-faktor wewenang desa yang telah dirancang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Suatu desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Daerah yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2.1.5 Teori/Konsep Efektivitas

Menurut Steer (2015 : 203) efektivitas adalah mengerjakan suatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Proses kerja sama sekelompok orang mencapai tujuan diperlukan organisasi sebagai wadahnya, dan untuk menggerakkan kerja sama tersebut di perlukan manajemen. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pengawasan.

Menurut Gibson (dalam Farid Wajdi 2022 : 145) yang menjelaskan pengukuran efektivitas yaitu:

1. Efisiensi yaitu perbandingan (ratio) output dan input. Berarti efisiensi ialah memaksimalkan output dengan input tertentu atau penggunaan input paling sedikit untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Kepuasan merupakan ukuran seberapa baik suatu organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepuasan pelanggan ialah tingkat perasaan manusia setelah kinerja yang ia rasakan disbanding dengan harapannya.
3. Keunggulan yaitu daya saing organisasi terhadap perubahan- perubahan saat ini. Keunggulan yang kompetitif dapat di peroleh dengan mengembangkan produk khusus yang lebih menguntungkan dari pada pesaing.
4. Pengembangan yaitu ukuran kemampuan suatu organisasi untuk meningkatkan kemampuannya memenuhi tuntutan masyarakat. Pengembangan merupakan ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya untuk pengembangan melalui investasi sumber daya.

Menurut Namawi (2015 : 76) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu yang memang dikehendakinya maka seseorang itu dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sabagai dikehendakinya. Dalam memaknai efektivitas kerja setiap karyawan memberi arti yang berbeda, sesuai sudut yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Menurut Beni (2016 : 76) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

2.1.6 Teori/Konsep Bantuan Lansung Tunai (BLT)

Bantuan Lansung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau dengan bersyarat (*unconditional cash transfers*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah negara tersebut.

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan Menteri Desa (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 14 Tahun 2020 dijelaskan tentang bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19, salah

satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang belum menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Permendes ini juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran, transparansi, serta musyawarah desa dalam proses pendataan dan penetapan penerima BLT.

Selain itu, kebijakan BLT Dana Desa juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. PMK ini mengatur mekanisme penganggaran, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa untuk BLT secara lebih teknis dan administratif. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa dapat dialokasikan untuk BLT dengan besaran dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan yang berlaku.

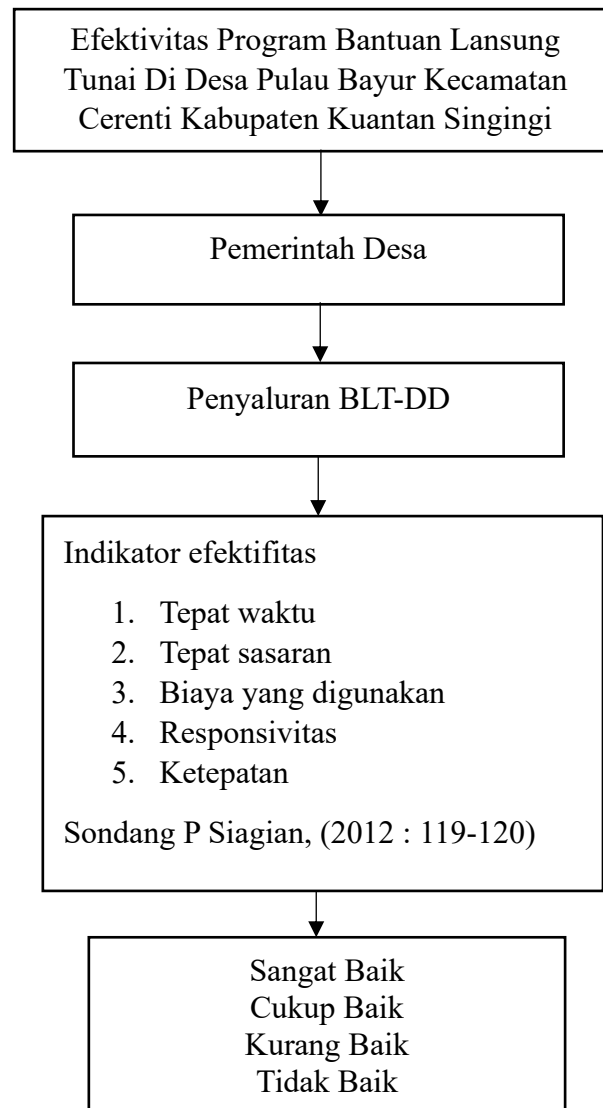
2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang peneting. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variable yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian (Sugiono, 2009 : 91)

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Dengan adanya kerangka berfikir ini baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini akan mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar II. 1 : Kerangka Berfikir tentang Efektivitas Program Bantuan Lansung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi penelitian 2026

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Diduga efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana sebagaimana semestinya.

2.4 Definisi Operasional

2.4.1 Administrasi negara adalah suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan.

2.4.2 Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.

2.4.3 Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.4 Efektivitas yaitu adanya hubungan antara output yang di hasilkan dengan sasaran yang telah ditetapkan jadi apabila kontribusi dari jumlah pegawai yang telah ditetapkan maka organisasi tersebut akan semakin efektif dalam mencapai tujuan.

2.4.5 Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah Program Bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau dengan bersyarat (*unconditional cash tranfers*) untuk masyarakat miskin.

2.4.6 Tepat Waktu adalah keseluruhan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.4.7 Tepat Sasaran adalah tujuan dan maksud yang dilakukan sudah tepat atau sasaran yang dipilih sudah cocok atau tepat sasaran.

2.4.8 Biaya yang dikeluarkan adalah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada masyarakat.

2.4.9 Kecukupan adalah tujuan yang telah tercapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

2.4.10 Ketepatan adalah tujuan program dan kuatnya asumsi tujuan-tujuan tersebut.

2.4.11 Responsivitas adalah respon dari suatu aktivitas atau tanggapan terhadap suatu program.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Lansung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variable	Indicator	Sumber Indikator	Ukuran
Efektivi tas	Program Bantuan Lansung Tunai	1.Tepat waktu	a. Tepat dalam proses	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
			b. Pelaksanaan program pelayanan	
		2.Tepat sasaran	a. Mekanisme pendataan penerima BLT	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
			b. Tepat dalam penerimaan Bantuan	
		3.Biaya yang di keluarkan (tepat guna)	a. Dana dan anggaran sesuai dengan program	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
			b. Dana yang diterima masyarakat	
		4.Responsivitas	a. Kebijakan pemerintah desa	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
			b. Peran pemerintah desa	
		5.Ketepatan	a. Tepat dalam proses penyaluran	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
			b. Tepat dalam penerima bantuan	

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010 : 1-2) penelitian kualitatif adalah alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Informan

Menurut Burgin (2007 : 76) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Penelitian ini mengandalkan informasi dari nara sumber yang kemudian disebut informan penelitian. Informan dalam penelitian ini di tentukan dengan teknik purposive sampling yang berarti bahwa informan di pilih berdasarkan kriteria-kriteria dan ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informan terkait dengan data-data penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III. 1 : Informan Penelitian tentang Pelaksanaan Program Bantuan Lansung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1.	Kepala Desa	-	1	10%
2.	Sekdes	1	-	10%
3.	Bendahara Desa	1	-	10%
4.	Kepala dusun	3	-	30%
5.	Pendamping	1	-	10%
6.	Masyarakat	3	-	30%
Jumlah		10		100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi sebagai informan penelitian. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi relatif kecil dan peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian ini yaitu:

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2014 : 131) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer juga disebut sebagai data asli. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer ini untuk mendapatkan

pendapatkan pendapat responden tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai desa pulau bayur kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014 : 131) data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan agar tidak terjadi peluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi hasil observasi dan analisis hasil penelitian akan lebih terarah. Penelitian ini di fokuskan pada Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian menentukan lokasi penelitian di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020 : 296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

3.6.1 Metode Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2020 : 297) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

3.6.2 Metode Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2020 : 304) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Fendi Hikmawati (2020 : 84) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Bachtiar (2021 : 117) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja, dan dilakukan dengan cara mengecek data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020 : 318) dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

3.7.1 Reduksi Data (*reduction data*)

Menurut Sandu Siyono dan Ali Sodik (2015 : 122–123) reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.

3.7.2 Penyajian Data (*data display*)

Menurut Miles dan Huberman (1994:11–12) penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Menurut Husaini Usman (2017 : 117) penarikan kesimpulan adalah upaya mencari makna, pola, hubungan, dan penjelasan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berkembang menjadi kesimpulan yang lebih kuat setelah melalui proses verifikasi.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas rogram Bantuan Lansung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal											X													
5	Revisi Proposal												X												
6	Pembuatan Skripsi													X	X	X	X	X	X	X					
7	Bimbingan Skripsi																				X	X	X		
8	Sidang Skripsi																							X	
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Peta dan Sejarah Desa Pulau Bayur

4.2.1 Sejarah Desa

Pada awalnya Desa Pulau Bayur berasal dari kata Bayur yang mana Bayur tersebut adalah nama sebuah pohon. Batang bayur tumbuh di wilayah desa dan menurut keyakinan masyarakat setempat pohon bayur dihuni oleh makhluk halus yang sangat mersahkan, dan mampu mengusir, dan yang mampu mengusir makhluk halus tersebut bernama Datuk Kuok. Desa Pulau Bayur terletak di pinggiran sungai kuantan yang terdapat pulau-pulau kecil yang timbul disaat air surut. Maka masyarakat setempat memberi nama desa ini Desa Pulau Bayur. Desa Pulau Bayur saat ini di pimpin oleh Pj. Kepala Desa, Desa Pulau Bayur terdiri dari 3 Dusun, 5 RW dan 10 RT. Jumlah penduduk desa Pulau Bayur pada saat ini ± 1.842 jiwa 417 Kepala Keluarga (KK).

4.2 Potensi Sumber Daya Alam

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Secara geografis Desa Pulau Bayur terletak di dataran rendah yang berbatasan dengan desa lain dalam satu kecamatan dan dalam satu kabupaten juga lain kecamatan dan kabupaten.

Adapun batas-batas dimaksud adalah :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Desa Koto Cerenti

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kecamatan Batang Peranap (INHU)

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Desa Pulau Jambu

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Desa Pulau Panjang Cerenti

Kehidupan masyarakat penduduk Desa Pulau Bayur, meskipun bersandingan dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu Kecamatan maupun diluar wilayah Kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai, harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling hormat menghormati, bantu membantu serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan untuk saling bergantung dan membutuhkan dengan yang lain.

4.2.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Pemukiman	: ± 574 Ha
Pertanian /Sawah	: ± 150 Ha
Ladang/Tegalan	: ± 50 Ha
Hutan Rakyat	: - Ha
Rawa-rawa	: ± 2 Ha
Perkantoran	: ± 1 Ha
Sekolah	: ± 0,5 Ha
Jalan Raya	: ± 11 Ha
Lapangan Bola	: ± 1 Ha

4.2.3 Orbitasi

Jarak ibu kota ke kecamatan terdekat	: 5 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 15 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	: 65 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	: 2 Jam

4.2.4 Iklim

Curah hujan	: 491mm
Jumlah bulan hujan	: 6 bulan
Kelembapan	: 75
Suhu rata-rata harian	: 250 C
Tinggi tempat dari permukaan laut	: 500 mdpl

4.2.5 Kependudukan

Untuk mengantisipasi kecanduan jumlah penduduk desa, Sekretariat Desa telah menyusun buku harian untuk alat control tentang jumlah penduduk dari berbagai sisi. Adapun jumlah penduduk terperinci, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Data Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	791 Jiwa
2.	Perempuan	1.051 Jiwa
Jumlah		1.842 Jiwa

Sumber: Laporan Penduduk Desa Pulau Bayur Tahun 2023

Tabel 4.5 Data Jumlah KK dan Rumah Tangga

No	Nama	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	417 KK
2.	Rumah Tangga	404 Rumah

Sumber: Laporan Penduduk Desa Pulau Bayur Tahun 2023

1. Penduduk berdasarkan agama

1. Pemeluk Agama Islam	: 1.842 Orang
2. Pemeluk Agama Kristen	: - Orang
3. Pemeluk Agama Khatolik	: - Orang
4. Pemeluk Agama Hindu	: - Orang

5. Pemeluk Agama Budha : - Orang
6. Penganut Kepercayaan : 1.842 Orang
2. Penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan
 1. Belum/Tidak Bekerja : 270 Orang
 2. Mengurus Rumah Tangga : 326 Orang
 3. Pelajar/Mahasiswa : 405 Orang
 4. Pegawai Negeri Sipil : 5 Orang
 5. Pensiunan : 3 Orang
 6. Anggota TNI : 3 Orang
 7. Anggota POLRI : 1 Orang
 8. Wiraswasta : 132 Orang
 9. Petani/Pekebun : 641 Orang
 10. Karyawan Honorer : 9 Orang
 11. Karyawan BUMN/BUMD : 0 Orang
 12. Buruh Harian Lepas : 47 Orang
 - Jumlah : 1.842 Orang
3. Penduduk berdasarkan pendidikan
 1. Belum/Tidak Sekolah : 215 Orang
 2. Belum Tamat SD/Sederajat : 192 Orang
 3. Tamat SD Sederajat : 216 Orang
 4. Tamat SMP Sederajat : 485 Orang
 5. Tamat SLTA Sederajat : 698 Orang

6. Diploma I/II/III	:	14	Orang
7. Strata I/ Diploma IV	:	22	Orang
8. Strata II	:	-	Orang
9. Strata III	:	-	Orang
Jumlah	:	1.842	Orang

4.2.6 Pertanian

1. Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan:

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	:	241	Keluarga
Tidak memiliki	:	76	Keluarga
Memiliki Kurang dari 10 Ha	:	132	Keluarga
Jumlah total keluarga petani	:	274	Keluarga

2. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas:

Jagung	:	1	Ha
Padi Sawah	:	150	Ha
Ubi Kayu	:	1	Ha

3. Perkebunan

Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas :

Karet	:	533	Ha
Kelapa Sawit	:	78	Ha

4.2.7 Peternakan

Jenis ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah
Populasi		

Sapi	56 Orang	302 Ekor
Kerbau	94 Orang	300 Ekor
Kambing	16 Orang	134 Ekor
Ayam	76 Orang	560 Ekor
Bebek	16 Orang	60 Ekor

4.2.8 Perikanan

Jenis Ikan	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah
Populasi		
Nila	10 Orang	10.000 Ekor
Patin	- Orang	- Ekor
Lele	- Orang	- Ekor

4.3 Ekonomi Desa

Potensi desa ekonomi sebagai penggerak perekonomian masyarakat yang memiliki pengertian bahwa tumbuh dan berkembangnya perekonomian desa akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Pencapaian pembangunan optimalisasi tersebut bermuara pada pengelolaan potensi desa sebagai basis penggerak ekonomi kerakyatan dalam suatu sistem yang sinergis. Pembangunan ekonomi desa dan kawasan perdesaan berdasarkan potensi lokal secara pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Adapun potensi ekonomi yang ada di Desa Pulau Bayur adalah sebagai berikut:

1. Produksi sayur-sayuran
2. Peternakan
3. Perikanan
4. Keterampilan dan kerajinan
5. Pasir dan batu

4.4 Kelembagaan

4.4.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Nama Lengkap	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1.	LPM	1	3	-
2.	PKK	1	-	5
3.	Karang Taruna	1	3	-
4.	RW	5	5	-
5.	RT	10	10	-
6.	Gapoktan	1	-	5
7.	Kelompok Tani	11	11	33
8.	Posyandu	2	-	12

4.4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Singingi Tahun 2018 Nomor 60) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Pulau Bayur sebagaiberikut:



4.4.3 Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun, yaitu:

a. Dusun I (satu)

Dusun I (satu) memiliki 4 RT dan 2 RW antara lain:

- a) RT 001
- b) RT 002
- c) RT 008
- d) RT 004
- e) RW 001
- f) RW 002

b. Dusun II (dua)

Dusun II (dua) memiliki 3 RT dan 2RW antara lain:

- a) RT 005
- b) RT 006

- c) RT 007
- d) RW 003
- e) RW 004
- c. Dusun III (tiga)

Dusun III (tiga) memiliki 3 RT dan 1 RW antara lain:

- a) RT 008
- b) RT 009
- c) RT 010
- d) RW 004
- e) RW 005

4.5 Potensi Sarana Prasarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Pulau Bayur sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Pulau Bayur.

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Pulau Bayur :

4.5.1 Sarana Dan Prasarana Transportasi

No.	Aset Prasarana Umum	Kondisi
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup
2.	Jalan Desa	Baik
3.	Jalan Lingkungan Masyarakat	Baik
4.	Jalan Kabupaten	Baik

4.5.2 Sarana Dan Prasarana Komunikasi Dan Informasi

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi
1.	Banner Transparansi	Baik
2.	Papan Informasi	Baik

4.5.3 Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi
1.	Sarana Air Bersih	Baik
2.	Rumah Layak Huni	Baik

4.5.4 Sarana Dan Prasarana Lembaga Masyarakat

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah
1.	Gedung Desa	Baik	1
2.	Kantor Desa	Baik	1
3.	Meja Rapat	Baik	6
4.	Meja Tamu	Baik	1
5.	Lap Top	Baik	3
6.	Printer	Baik	2
7.	Meja Kerja	Baik	9
8.	Lemari Arsip	Baik	2

4.5.5 PKK

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Kantor	Belum Ada
2.	Kepengurusan	Ada
3.	Buku Asministrasi PKK	Ada
4.	Kegiatan	Ada
5.	Jumlah Kegiatan	4

4.5.6 Rukun Tetangga

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ket/Jumlah
1.	Rukun Tetangga	10
2.	Kepengurusan	Ada
3.	Buku Administrasi RT	Ada
4.	Kegiatan	Ada
5.	Jmlah Kegiatan	10

4.5.7 BUMDes

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	BUMDes Sinar Harapan	Ada
2.	Kantor	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi BUMDes	Ada
6.	Kegiatan/Usaha	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	1

4.5.8 Forum Kader Lainnya

No.	Jenis Kader	Keterangan	Jumlah
1.	KPMD	Ada	1
2.	LPM	Ada	1
3.	BKMT	Ada	1
4.	Posyandu	Ada	2

4.5.9 Prasarana Peribadahan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah
1.	Masjid	Baik	3
2.	Mushollah	Baik	2

4.5.10 Prasarana Olahraga

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Ket/Jumlah
1.	Lapangan Bola	Baik	1
2.	Lapangan Voli	Baik	5
3.	Badminton	Baik	1

4.5.11 Prasarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Ket/Jumlah
1.	Pustu/Poskesdes	Aktif	1
2.	Posyandu	Aktif	2
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

4.5.12 Prasarana Dan Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah
1.	SD	Baik	1
2.	MDA	Baik	1
3.	TK	Baik	1
4.	PAUD	Baik	1

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLT secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Program ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta meringankan beban ekonomi keluarga.

Dilihat dari indikator efektivitas, proses penyaluran bantuan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, terutama pada aspek pendataan dan penetapan penerima manfaat. Masih terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata sebagai penerima, sehingga ketepatan sasaran program belum sepenuhnya optimal. Selain itu, waktu penyaluran bantuan juga belum selalu sesuai dengan jadwal yang diharapkan masyarakat.

Secara keseluruhan, Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat penerima. Namun, peningkatan kualitas pendataan, transparansi, serta pengawasan masih diperlukan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

6.2 Saran

- 6.2.1 Pemerintah Desa Pulau Bayur diharapkan meningkatkan akurasi pendataan calon penerima BLT melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
- 6.2.2 Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dalam proses penetapan penerima manfaat melalui musyawarah desa dan penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat.
- 6.2.3 Penyaluran BLT hendaknya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar bantuan dapat dimanfaatkan masyarakat pada saat dibutuhkan.
- 6.2.4 Pengawasan terhadap pelaksanaan program perlu ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat sehingga pelaksanaan BLT menjadi lebih akuntabel dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran.
- 6.2.5 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau indikator lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Faried. 2017. *Administrasi Negara Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Anderson, James E. 2010. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bachtiar. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Beni, Pekei. 2016. *Manajemen Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Daryanto. 2011. *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Bukti*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, James L. 2012. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kartohadikusumo. 2008. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mulyadi. 2016. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Namawi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, Syafruddin, dan Basyiruddin Usman. 2004. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Ngalm. 2010. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 2015. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Tentang : Efektivitas Program Bantuan Lansung Tunai di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti

A. Identitas Peneliti

Nama : Musdalipa
NPM : 220411053
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
No HP : 0812-9204-7054

B. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :
Usia :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiaannya.
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan

Daftar Pertanyaan Penelitian Tentang Efektivitas Program Bantuan Lansung Tunai Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

I. Indikator Tepat Waktu

Tepat waktu adalah kesesuaian waktu pelaksanaan program BLT mulai dari pendataan, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

1. Apakah dalam proses penyaluran program bantuan langsung tunai di desa pulau bayur tepat waktu?
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan program bantuan langsung tunai di desa pulau bayur?

II. Indikator Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima BLT.

1. Apakah mekanisme pendataan penerima bantuan langsung tunai di desa pulau bayur sudah tepat sasaran?

2. Bagaimana pelaksanaan penerima bantuan langsung tunai desa pulau bayur?

III. Indikator Biaya yang digunakan (Tepat Guna)

Biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan manfaat bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat penerima.

1. Apakah dana dan anggaran sesuai dengan program yang dikeluarkan masyarakat?
2. Bagaimana jumlah dana yang diterima masyarakat apa sesuai dengan ketentuan?

IV. Indikator Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat terkait program BLT.

1. Apakah kebijakan pemerintah desa mampu menanggapi masyarakat?
2. Bagaimana peran pemerintah desa melaksanakan program bantuan langsung tunai?

V. Indikator Ketepatan

Ketepatan menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan dan penerima bantuan telah sesuai dengan tujuan program BLT.

1. Apakah proses penyaluran tepat dalam prosedur penyaluran?
2. Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam proses penerima bantuan BLT?

Pulau Bayur, Juli, 2026

**DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG EFEKTIVITAS
PROGRAM BANTUAN LANSUNG TUNAI
DI DESA PULAU BAYUR KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Gambar I : Wawancara dengan Bendahara Desa Pulau



Gambar II : Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Bayur



Gambar III : Wawancara dengan Kepala Dusun 1 Desa Pulau Bayur



Gambar IV : Wawancara dengan Masyarakat (Nadri) Desa Pulau Bayur



Gambar V : Wawancara dengan masyarakat (Nasron) Desa Pulau Bayur



Gambar VI : Wawancara dengan masyarakat (Yulita) Desa Pulau Bayur



Gambar VI :Wawancara dengan Kepala Dusun 3 Desa Pulau Bayur



Gambar VI :Wawancara dengan Kepala Dusun 2 Desa Pulau Bayur



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR 035 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (SI) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (SI) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002
- b. Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Musdalipa
 NPM : 220411053
 Judul Skripsi : Analisis Program Bantuan Lanjut Usia di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (SI) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (SI) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN CERENTI
DESA PULAU BAYUR

Alamat : Jl. Basir RT 10 RW 05 Dusun III Desa Pulau Bayur Kode Pos: 29555

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470 /SKP/PLB/VII/2026/125

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj. Kepala Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : **MUSDALIPA**
 NIM : 2204110553
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRANSI NEGARA
 FAKULTAS : FAKULTAS ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Nama yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Bayur , 31 Juli 2026

Pj. KEPALA DESA PULAU BAYUR

DISLAGANA FARCE, S.Pd

Nip: 19880528 201001 1 003



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MUSDALIPA

NPM : 220411053

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

JUDUL : ANALISIS PROGRAM BANTUAN LANSUNG TUNAI DI
 DESA PULAU BAYUR KECAMATAN CERENTI
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	25/10/2025	- Cover - Lambang 3x3		<i>Ag</i>	
		- Tulisan - Margin		<i>Ag</i>	
2	13/11/2025	- Daftar isi - Latar Belakang		<i>Ag</i>	
3	16/12/2025	- Abstrak - Tulisan		<i>Ag</i>	
4.	30/12/2025	- Kerangka Pemikiran - Tambah teori		<i>Ag</i>	
5	8/01/2026	- Daftar tabel - Daftar gambar		<i>Ag</i>	

6	20/1 2026	-Daftar pustaka	~~Aa~~	
		-Rafkan tulisan	~~Aa~~	
7	11/2 26	Aa	~~Aa~~	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUSDALIPA

NPM : 220411053

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

JUDUL : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANSUNG TUNAI
 DI DESA PULAU BAYUR KECEMATAN CERENTI
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	13/7 2026	Penulisan Bab VI		Ay	
	22/7 2026	Melengkapi Daftar isi		Ay	
	27/7 2026	Pemambahan pembahasan		Ay	
	30/7 2026	Rapikan penulisan		Ay	
	4/8 2026	lengkapi pengesahan		Ay	
		dan surat orisinalitas			



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Musdalipa

NPM : 220411053

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur Kec.
 Cerenti Kab. Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis, 23 April 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos, M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Musdalipa**

NPM : 220411053

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Bayur
 Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 03 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.IP., M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Musdalipa
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Bayur, 29 Mai 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pulau Bayur
Alamat Email : musdalipah340@gmail.com
Pendidikan : 1. Tahun 2010-2016 SDN 012 Koto Cerenti
2. Tahun 2016-2019 SMPN 1 Cerenti
3. Tahun 2019-2022 SMAN 1 Cerenti

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 11 Juni 2026

Penulis

MUSDALIPA
NPM.220411053